



Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan

Cellya

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Cinta Ummairo Agustin

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Lidia Andika

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Natalia Fitrita Lumban Gaol

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Yesi Anastasia Tamba

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Korespondensi penulis : cellya@gmail.com

ABSTRACT *This study explores the budget realization reports in the Medan City Government in 2020-2022, through an analytical descriptive approach. Involving a study of budget realization reports and interviews with relevant parties, this research explores the extent to which budget realization achievements meet predetermined targets and their impact on regional development. The analysis includes an evaluation of the relationship between the planned budget and the actual realization. In addition, the study identifies factors that influence budget performance and evaluates the implications of budget realization on regional development. The results of this study provide a comprehensive picture of the effectiveness and efficiency of budget management in the Medan City Government in 2020-2022. The findings are expected to make a valuable contribution in designing more responsive policies that support sustainable development at the local level.*

Keywords: *Budget Analysis, Budget Realization, Budget Management Effectiveness, Development Impact, Medan City Government in 2020-2022.*

ABSTRAK Penelitian ini mendalami laporan realisasi anggaran di Pemerintahan Kota Medan tahun 2020-2022 melalui pendekatan deskriptif analisis. Melibatkan studi laporan realisasi anggaran dan wawancara dengan pihak terkait, penelitian ini mengeksplorasi sejauh mana pencapaian realisasi anggaran memenuhi target yang telah ditetapkan dan dampaknya terhadap pembangunan daerah. Analisis yang dilakukan mencakup evaluasi keterkaitan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi yang terjadi. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja anggaran serta mengevaluasi implikasi dari realisasi anggaran terhadap pembangunan daerah. Hasil penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran di Pemerintahan Kota Medan tahun 2020-2022. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam merancang kebijakan yang lebih responsif serta mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.

Kata Kunci: Analisis Anggaran, Realisasi Anggaran, Efektivitas Pengelolaan Anggaran, Dampak Pembangunan, Pemerintahan Kota Medan, Tahun 2020-2022.

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan anggaran di tingkat daerah, khususnya Pemerintahan Kota Medan tahun 2020-2022, menjadi aspek vital dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Tahun 2021 menandai sebuah periode kritis dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, terutama seiring dengan berbagai perubahan dan tantangan yang dihadapi, seperti dampak

pandemi global dan perubahan kondisi ekonomi. Pentingnya pengelolaan anggaran yang baik tergambar dalam berbagai regulasi dan peraturan yang mengatur tentang tata kelola keuangan

daerah. Salah satu dasar hukum yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kemudian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi panduan dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah.

Ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi anggaran dapat menjadi masalah serius dalam mencapai tujuan pembangunan. Para ahli dalam bidang keuangan daerah menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Mereka menyoroti perlunya analisis mendalam terhadap laporan realisasi anggaran guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan efisien. Dalam konteks Sumatera Utara, daerah ini memiliki karakteristik dan dinamika tersendiri yang memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, analisis laporan realisasi anggaran pada tahun 2021 menjadi krusial untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah serta menemukan potensi perbaikan dalam rangka mencapai pembangunan yang lebih baik.

Realisasi aturan Laporan memberikan berita tentang realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan investasi Pemkot Medan yang dibandingkan satu sama lain. Realisasi anggaran menyampaikan gosip yang bermanfaat untuk meramalkan indikator-indikator ekonomi yang akan dipergunakan buat memitigasi dampak gempa bumi Medan pada tahun-tahun mendatang menggunakan pendekatan kooperatif dalam pelaporan data. Laporan Realisasi Anggaran tersaji dengan menyoroti banyak sekali unsur pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan buat penelitian yang bermakna. Mengingat peran krusial penyusunan aturan dalam perusahaan adalah suatu keharusan bagi setiap perencanaan serta pengendalian manajemen; maka manajemen perusahaan akan kehilangan keliru satu elemen penting pada implementasi fungsi manajemen yang sedang dilaksanakan. (Putri Kemala, 2017)

Penelitian ini memberikan kontribusi berharga terhadap pengembangan pengetahuan di bidang pengelolaan anggaran daerah di Pemerintahan Kota Medan Tahun 2020-2022. Hasil penelitian akan memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, memberikan landasan bagi perbaikan dan pengembangan kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan anggaran dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini akan meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah terkait pengelolaan anggaran, menyediakan informasi yang jelas tentang kinerja keuangan daerah.

Dengan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran, penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran. Manfaat informasi yang dihasilkan oleh penelitian ini juga dapat dirasakan oleh pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, badan pengawas, akademisi, dan masyarakat umum. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah merancang strategi untuk meningkatkan kinerja dan pencapaian pembangunan dengan mengevaluasi dampak realisasi anggaran. Dengan demikian, penelitian ini berperan penting dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Pemerintahan Kota Medan Tahun 2020-2022.

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1 Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan sebuah rencana keuangan yang disusun untuk suatu periode tertentu yang mencakup alokasi sumber daya keuangan, baik pendapatan maupun belanja, dengan tujuan mencapai sasaran dan target tertentu. Anggaran tidak hanya bersifat sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja.

Menurut Abdullah (2015), anggaran adalah suatu pernyataan tertulis mengenai pendapatan dan belanja yang direncanakan oleh pemerintah atau badan usaha untuk suatu periode tertentu di masa yang akan datang. Dalam konteks pemerintahan daerah, anggaran mencakup alokasi dana untuk berbagai program dan kegiatan yang bertujuan mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Anggaran memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai alat perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Sebagai alat perencanaan, anggaran membantu pemerintah untuk merumuskan rencana pembangunan yang lebih terarah. Dalam fungsi pengendalian, anggaran digunakan sebagai alat untuk mengawasi dan mengendalikan penggunaan dana sesuai dengan rencana yang telah disusun. Dengan demikian, pengertian anggaran mencakup dimensi perencanaan, alokasi, dan kontrol keuangan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu sesuai dengan kebijakan pemerintah atau badan usaha yang bersangkutan.

2.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merujuk pada implementasi atau pelaksanaan anggaran yang telah direncanakan dalam suatu periode tertentu. Ini mencakup penerimaan dan pengeluaran dana sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam anggaran yang telah disusun. Realisasi anggaran dapat mencakup berbagai aspek, termasuk pencapaian target pendapatan, efektivitas penggunaan dana, dan dampak pengeluaran terhadap pembangunan dan pelayanan publik. Dalam konteks pemerintahan daerah, realisasi anggaran mencerminkan sejauh mana kebijakan keuangan daerah dapat dijalankan dengan efisien dan sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Beberapa poin penting terkait realisasi anggaran meliputi:

1. **Pencapaian Target Pendapatan:** Realisasi anggaran pendapatan mencakup sejauh mana penerimaan pajak, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya mencapai target yang telah ditetapkan dalam anggaran.
2. **Penggunaan Dana dengan Efektif:** Pengeluaran yang sesuai dengan anggaran harus dievaluasi dari segi efektivitas. Artinya, dana yang dihabiskan harus memberikan dampak yang diinginkan terhadap pembangunan dan pelayanan yang diberikan.
3. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Realisasi anggaran yang transparan dan akuntabel menciptakan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini melibatkan pelaporan yang jelas dan terbuka terkait dengan penggunaan dana publik.
4. **Evaluasi Dampak Pembangunan:** Realisasi anggaran juga harus dievaluasi dari perspektif dampaknya terhadap pembangunan daerah. Ini melibatkan penilaian terhadap proyek-proyek yang didanai dan sejauh mana tujuan pembangunan tercapai.

Dengan memahami realisasi anggaran, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi potensi perbaikan, meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, dan memastikan bahwa alokasi dana yang ada memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan daerah.

2.2 Keterkaitan Antara Anggaran dan Realisasi

Keterkaitan antara anggaran dan realisasi mencerminkan hubungan esensial antara rencana keuangan yang telah disusun (anggaran) dan implementasinya dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran dana (realisasi). Keterkaitan ini mencakup beberapa aspek penting dalam konteks pengelolaan keuangan, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan keterkaitan antara anggaran dan realisasi:

1. **Perencanaan dan Implementasi:** Anggaran berfungsi sebagai instrumen perencanaan keuangan yang merinci alokasi dana untuk berbagai kegiatan dan program. Realisasi mengacu pada pelaksanaan rencana keuangan tersebut, di mana alokasi dana diterapkan sesuai dengan yang telah direncanakan.
2. **Pengendalian dan Evaluasi:** Anggaran digunakan sebagai alat pengendalian keuangan untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan rencana. Realisasi anggaran memberikan dasar untuk evaluasi kinerja dan pencapaian tujuan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat.
3. **Penyesuaian dan Revisi:** Realisasi anggaran dapat memberikan informasi yang penting untuk menilai sejauh mana rencana keuangan dapat dijalankan sesuai dengan kondisi aktual. Hasil realisasi anggaran dapat digunakan untuk membuat penyesuaian atau revisi pada anggaran berikutnya agar lebih sesuai dengan kebutuhan aktual.
4. **Akuntabilitas dan Transparansi:** Anggaran menciptakan landasan akuntabilitas, dengan merinci bagaimana dana publik akan digunakan. Realisasi anggaran yang transparan memberikan informasi yang jelas kepada pemangku kepentingan dan masyarakat mengenai penggunaan dana sesuai dengan rencana.
5. **Efisiensi Pengelolaan Keuangan:** Keterkaitan antara anggaran dan realisasi membantu dalam mengevaluasi efisiensi pengelolaan keuangan. Dengan memahami sejauh mana realisasi mencapai target yang direncanakan, pemerintah dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi.

Dengan memahami keterkaitan antara anggaran dan realisasi, pemerintah dan badan usaha dapat meningkatkan pengelolaan keuangan, mengoptimalkan pencapaian tujuan, dan memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan kebutuhan aktual.

2.1 Analisis Laporan Realisasi Anggaran

Analisis laporan realisasi anggaran merupakan proses yang mendalam dan sistematis dalam mengevaluasi sejauh mana pencapaian target dan dampak dari penggunaan anggaran suatu entitas atau pemerintah. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Siregar pada tahun 2019, analisis laporan realisasi anggaran memiliki peran krusial dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian antara rencana anggaran dan realitas pelaksanaannya. Proses ini melibatkan beberapa tahapan esensial:

1. **Pembandingan Target dan Realisasi:** Evaluasi dilakukan dengan membandingkan target anggaran yang telah direncanakan dengan realisasi yang terjadi. Penilaian ini membantu mengukur sejauh mana anggaran telah mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. **Identifikasi Perbedaan dan Varian:** Identifikasi perbedaan yang signifikan antara anggaran yang direncanakan dan yang terealisasi. Analisis varian dilakukan untuk memahami penyebab perbedaan tersebut, baik yang bersifat positif maupun negatif.
3. **Analisis Faktor Penyebab Ketidaksesuaian:** Penelusuran faktor-faktor yang memengaruhi

ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi. Analisis mendalam terhadap kondisi eksternal, kebijakan pemerintah, atau aspek internal organisasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan anggaran.

4. Merumuskan Rekomendasi Perbaikan: Berdasarkan analisis, penyusunan rekomendasi perbaikan dilakukan. Rekomendasi mencakup langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efisiensi, mengatasi hambatan, dan memperbaiki kinerja keuangan.

Analisis laporan realisasi anggaran tidak hanya memberikan gambaran tentang kinerja keuangan, tetapi juga menyediakan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi implementasi anggaran. Dengan demikian, rekomendasi perbaikan yang dihasilkan dari analisis ini dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran di masa mendatang, menciptakan dampak positif pada pembangunan dan efisiensi keuangan entitas atau pemerintah yang bersangkutan.

2.2 Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan landasan hukum utama yang mengatur tata kelola dan pengelolaan anggaran di tingkat daerah. Undang-undang ini dan peraturan pemerintah terkait memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pengelolaan keuangan daerah, termasuk proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan negara, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 lebih fokus menguraikan tata cara pengelolaan keuangan daerah, termasuk proses penyusunan anggaran, pengelolaan kas daerah, dan pelaporan keuangan daerah.

Kedua peraturan tersebut bekerja sama untuk memberikan arahan yang komprehensif dan terintegrasi, memastikan bahwa pengelolaan anggaran di tingkat daerah sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan negara yang baik. Dengan adanya landasan hukum ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola anggaran dengan efektif, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

3 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengumpulkan data anggaran dan realisasi keuangan daerah Pemerintahan Kota Medan Tahun 2020-2022. Populasi penelitian melibatkan seluruh data anggaran dan realisasi keuangan daerah Pemerintahan Kota Medan pada tahun tersebut, dengan pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terkait laporan anggaran dan realisasi. Selain itu, wawancara dengan pejabat terkait dapat dilakukan untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai konteks dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan anggaran. Teknik analisis data melibatkan analisis deskriptif untuk menguraikan pencapaian target, perbedaan, dan variasi data, serta menggunakan analisis varian untuk mengevaluasi perbedaan antara anggaran dan realisasi beserta identifikasi faktor-faktor penyebabnya. Dalam interpretasi hasil, statistika deskriptif seperti mean, median, dan deviasi standar akan digunakan untuk memberikan gambaran rinci tentang distribusi data keuangan daerah. Metodologi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan anggaran daerah, faktor-faktor yang memengaruhi, serta memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan dan praktik

pengelolaan anggaran yang lebih efektif.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Daerah Pengukuran Kinerja pemerintah Daerah kota Medan dengan Metode analisis deskriptif yang diukur dengan menggunakan rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas atas pajak daerah,, dimana dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Biaya Pendapatan Daerah}}{\text{Anggaran Biaya Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Ketentuan:

1. Jika >100% maka Sangat Ekonomis
2. Jika 90%-100% maka Ekonomis
3. Jika 80%-90% maka Cukup Ekonomis
4. Jika 60%-80% maka Kurang Ekonomis
5. Jika <60% maka Tidak Ekonomis

Tabel 4.1 Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun 2020-2022 (Dalam Satuan Milyar).

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2020	4,757	3,988	83,83
2021	5,208	5,023	96,43
2022	6,422	5,449	84,84

Sumber: kemenkeu, data diolah penulis

Pada tabel 4.1. merupakan hasil penelitian tentang realisasi pendapatan daerah Kota Medan (berupa, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah) selama periode tahun 2020- 2022. Pemerintah kota Medan belum terlalu belum baik dalam merealisasikan pendapatan daerah. Dapat di lihat anggaran dan realisasi pendapatan pada Pemerintahan Kota Medan selama kurun waktu 3 tahun berturut-turut. Dimana dapat dilihat pada tahun 2020 dengan persentase 83,83% masih belum mencapai target yang telah di tentukan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota Medan belum disiplin dalam menggunakan anggaran pada saat memulai pelaksanaan program pemerintah dan pada akhir masa pelaksanaannya. Hingga pada tahun 2022 anggaran di naikan namun terjadi penurunan realisasi dengan persentase 84,84% yang terbilang mengalami penurunan dalam pertumbuhan realisasinya yang dibandingkan dari tahun 2021 dimana, persentase yang dapat dicapai 96,43%, akan tetapi hal ini juga belum memenuhi target yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Berdasarkan data dari tahun ke tahun realisasi anggaran pendapatan kota Medan masih belum tidak mencapai 100% sehingga dapat dikatakan kurang efektif.

Tabel 4.2 Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun 2020-2022 (Dalam Satuan Milyar).

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2020	5,254	3,584	72,35
2021	5,731	4,499	78,5
2022	6,722	6,047	75,80

Sumber: kemenkeu, data diolah penulis

Pada tabel 2. Dapat dilihat bahwa dalam periode tahun 2020-2022 tentang realisasi belanja daerah pemerintahan Kota Medan (berupa belanja tidak langsung, dan belanja langsung) tidak melebihi

dengan jumlah yang dianggarkan. Pada tahun 2020, realisasi belanja sebesar 72,35% dimana pemerintah terus melakukan optimalisasi realisasi belanja Kota Medan didorong oleh seluruh komponen di antaranya belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial utamanya untuk penanganan pandemi COVID-19. Kemudian, realisasi belanja daerah 2021 naik menjadi 78,5% karena terlambatnya pembayaran ke pihak ketiga. Hal ini diakibatkan oleh perlambatan yang didorong oleh penurunan pada komponen belanja operasi seiring dengan terbatasnya realisasi belanja barang dan jasa, seperti pelaksanaan rapat dan event yang masih dilaksanakan virtual. Kemudian pada tahun 2022 turun kembali menjadi 75,80 %.

Tabel 4.3 Rasio Derajat Desentralisasi (Dalam Satuan Milyar).

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2020	1,509	3,584	2,64
2021	1,906	4,499	2,63
2022	2,230	5,449	2,44

Sumber: kemenkeu, data diolah penulis

Tabel 4.3 menyatakan bahwa derajat desentralisasi Kota Medan setiap tahunnya tergolong kriteria sangat kurang yang berarti sangat kurangnya tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan Pemerintah Daerah Tingkat derajat desentralisasi pada tahun 2020 sebesar 2,64%, tahun 2021 sebesar 2,63%, tahun 2022 sebesar 2,44%. Tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah Kota Medan untuk menggali dan mengolah pendapatan masih dikatakan rendah sekali.

RASIO EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH

Rasio Efektivitas = *Realisasi pajak daerah* x 100%

Target Pajak Daerah

Ketentuan:

1. Jika >100% maka Sangat Efektif
2. Jika 90%-100% maka Efektif
3. Jika 80%-90% maka Cukup Efektif
4. Jika 60%-80% maka Kurang Efektif
5. Jika <60% maka Tidak Efektif

Tabel 4.4 Rasio efektifitas pajak (Dalam Satuan Milyar).

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2020	1,359	1,195	87,96
2021	1,693	1,495	88,3
2022	2,587	1,961	75,80

Sumber: kemenkeu, data diolah penulis

Tabel 4.4 di atas dapat dilihat rasio efektivitas pajak daerah yaitu tahun 2020 sebesar 87,96%, tahun 2021 sebesar 88,3%, tahun 2022 sebesar 75,80%. Persentase di atas dalam pemerintah Kota Medan cukup efektif dalam merealisasikan pajak daerahnya pada tahun 2020-2021, namun di tahun 2022 termasuk dalam kategori kurang efektif. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan diketahui bahwa jumlah potensi untuk pajak daerah selama tahun 2021 adalah tahun yang potensi penerimaan pajaknya

sangat efektif dibandingkan tahun-tahun lainnya yang termasuk dalam kategori cukup efektif. Namun, perlu diingat bahwa besarnya potensi yang ada pada pajak daerah tersebut masih harus dioptimalkan agar mencapai target dalam pajak daerah yang sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah Kota Medan.

RASIO EFISIENSI BELANJA

Rasio efisiensi belanja dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi belanja} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Ketentuan:

1. Jika >100% maka Sangat Efisien
2. Jika 90%-100% maka Efisien
3. Jika 80%-90% maka Cukup Efisien
4. Jika 60%-80% maka Kurang Efisien
5. Jika <60% maka Tidak Efisien

Tabel 4.5 Rasio Efisiensi Belanja (Dalam Satuan Milyar).

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2020	5,254	3,854	73,35
2021	5,731	4,499	78,5
2022	6,722	6,047	89,95

Sumber: kemenkeu, data diolah penulis

Berdasarkan tabel 4.5, realisasi belanja daerah di kota medan dapat dikatakan efektif dan efisien dikarenakan persentasenya di bawah 80% (cukup efisien). Namun pada tahun 2022 tergolong efisien dikarenakan hampir menyentuh angka 90%. Rasio Efisiensi dapat dihitung dengan cara membandingkan biaya pemerolehan PAD dengan realisasi penerimaan PAD, semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja suatu daerah dalam melaksanakan pemerintahan. Dari hasil perhitungan rasio efisiensi belanja kota medan dapat dikatakan dalam tahun 2020-2022 tergolong baik karena mendapat persentase rata rata di bawah 80%.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kota Medan selama tahun 2020-2022 masih belum mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang optimal. Meskipun terjadi peningkatan realisasi belanja dari tahun ke tahun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan realisasi anggaran pendapatan, terutama dalam hal optimalisasi pajak daerah.

Tingkat desentralisasi Kota Medan masih tergolong rendah, menunjukkan perlunya pemerintah pusat memberikan lebih banyak kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah.

Meskipun demikian, terdapat beberapa peningkatan dalam efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran daerah, terutama pada tahun 2022.

Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan anggaran serta implementasi rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Medan.

Saran

1. Perlu peningkatan disiplin dalam penggunaan anggaran untuk memastikan realisasi anggaran

- mendekati atau mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Pemerintah Kota Medan perlu memperhatikan pengelolaan belanja agar lebih efisien, dengan fokus pada peningkatan realisasi belanja untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
 3. Evaluasi dan perbaikan terus-menerus terhadap pelaksanaan anggaran serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan daerah
 4. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk mendalami factor-faktor pengaruh realisasi anggaran kota Medan serta membandingkan kinerjanya dengan daerah lain untuk mencari praktik terbaik dalam pengelolaan anggaran daerah

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. (2015). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Siregar, H. (2019). Analisis Laporan Realisasi Anggaran sebagai Alat Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 14(2), 89-104.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Situmorang, T. B. (2020). Dinamika Pengelolaan Anggaran Daerah: Studi Kasus di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 112-128.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021: Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). Profil Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.
- Harahap, S. S. (2017). Teori Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.